

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT PENYELESAIAN
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI PADA PEMERINTAH
DAERAH DI PULAU JAWA DAN BALI**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**PIPIT SITI JENAR PUSPITASARI
NIM. 12030114183003**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Pipit Siti Jenar Puspitasari
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183003
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
BPK RI PADA PEMERINTAH DAERAH DI
PULAU JAWA DAN BALI**
Dosen Pembimbing : Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 30 November 2016

Dosen Pembimbing



(Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 198010012008011014

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Pipit Siti Jenar Puspitasari
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183003
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
BPK RI PADA PEMERINTAH DAERAH DI
PULAU JAWA DAN BALI**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji :

1. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.
2. Totok Dewayanto, S.E., M. Si., Akt.
3. Adityawarman, S.E., M.Acc., Akt.

()

()

()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Pipit Siti Jenar Puspitasari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA DAN BALI**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 November 2016

Yang membuat pernyataan,



Pipit Siti Jenar Puspitasari

NIM. 12030114183003

**'Usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak
menyerah.'**

- Napoleon Hill-

**"Anda tidak bisa lari dari tanggung jawab esok hari
dengan menghindarinya hari ini"**

-Abraham Lincoln-

Skripsi ini dipersembahkan untuk keluarga dan teman-teman penulis

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that influence follow-up of audit recommendation. The independent variables that tested in this study are auditor's professional skills, the type of local government, the number of accounting entities, tenure regional head, the age of local government, the dependance level and legislative oversight.

This study uses secondary data derived from a detailed list of BPK's follow-up Audit on the District and City government in Java and Bali for the period up to 2015. The research sample of 122 district and city in the province of West Java, Central Java, East Java, Banten, Special Region of Yogyakarta and Bali. The analytical method used is multiple linear regression analysis.

The results show that auditor's professional skills have positive affect to follow-up of audit recommendation. Meanwhile the type of local government, the number of accounting entities, tenure regional head, the age of local government, the dependance level, legislative oversight do not affect the follow-up of audit recommendation.

Keywords: follow-up audit, recommendation, auditor's professional skills, the type of local government, the number of accounting entities, tenure regional head, the age of local government, the dependance level, legislative oversight.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah daerah. Variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini adalah kecakapan auditor, tipe pemerintah daerah, jumlah SKPD, masa jabatan kepala daerah, umur pemerintah daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan pengawasan legislatif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari daftar rincian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali periode hingga tahun 2015. Sampel penelitian sebanyak 122 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecakapan profesional auditor berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Sedangkan tipe pemerintah daerah, jumlah SKPD, masa jabatan kepala daerah, umur pemerintah daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan pengawasan legislatif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Kata kunci: tindak lanjut hasil pemeriksaan, rekomendasi, kecakapan profesional auditor, tipe pemerintah daerah, jumlah SKPD, lama masa jabatan kepala daerah, umur pemerintah daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, pengawasan legislatif.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA DAN BALI”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa usaha yang penulis lakukan selama masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Yeyet Ruyeti, atas segala doa, restu, dan kasih sayang kepada penulis, serta Yenni Dwi Ariyani, adik penulis yang senantiasa memberi semangat dan keceriaan;
2. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;
3. Fuad, S.E.T., M.Si., Akt., Ph.D, selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;

4. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah banyak membantu penulis dalam permasalahan akademis di Universitas Diponegoro.
6. Seluruh staf pengajar di FEB Universitas Diponegoro yang telah mengajar dan membagi ilmu serta pengalamannya kepada penulis selama proses perkuliahan;
7. Rekan-rekan BPK seangkatan tugas belajar Undip tahun 2014, yang telah memberikan segala masukan dalam menyelesaikan skripsi ini dan bersama-sama selama proses perkuliahan di Universitas Diponegoro;
8. Teman-teman satu bimbingan Dwi, Lambok dan La Ode yang bersama-sama berjuang dan saling memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini;
9. BPK RI yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan gelar akademis di Universitas Diponegoro.
10. Seluruh pihak yang turut mendukung segala proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak yang menggunakannya.

Semarang, 30 November 2016

Penulis,

Pipit Siti Jenar Puspitasari

NIM. 12030114183003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Konsep Teori Keagenan pada Sektor Publik	13
2.1.2 Teori Sinyal	15

2.1.3	Pemeriksaan terhadap Pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPK	16
2.1.4	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	18
2.1.5	Kecakapan Auditor	19
2.1.6	Karakteristik Pemerintah Daerah	20
2.1.7	Pengawasan Legislatif	21
2.2	Penelitian Terdahulu	22
2.3	Kerangka Pemikiran	24
2.4	Pengembangan Hipotesis.....	26
2.4.1	Pengaruh Kecakapan Auditor terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	26
2.4.2	Pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	27
2.4.3	Pengaruh jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil Rekomendasi pemeriksaan BPK	29
2.4.4	Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	31

2.4.5	Pengaruh ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil Rekomendasi pemeriksaan BPK	32
2.4.6	Pengaruh masa jabatan kepala daerah terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil Rekomendasi pemeriksaan BPK.....	34
2.4.7	Pengaruh pengawasan legislatif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil Rekomendasi pemeriksaan BPK	35
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	37
3.1.1	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	37
3.1.2	Kecakapan Auditor.....	38
3.1.3	Tipe Pemerintah Daerah	38
3.1.4	Jumlah SKPD Pemerintah Daerah	39
3.1.5	Umur Pemerintah Daerah.....	39
3.1.6	Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat	40
3.1.7	Masa Jabatan Kepala Daerah	41
3.1.8	Pengawasan Legislatif	41
3.2	Populasi dan Sampel	42
3.3	Jenis dan Sumber Data	43
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	43

3.5	Metode Analisis	44
3.5.1	Statistik Deskriptif	44
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	44
3.5.2.1	Uji Normalitas Data	44
3.5.2.2	Uji Autokorelasi.....	45
3.5.2.3	Uji Multikolonieritas	45
3.5.2.4	Uji Heteroskedastisitas	46
3.5.3	Analisis Regresi Berganda	46
3.5.4	Uji Hipotesis.....	48
3.5.4.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	48
3.5.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	48
3.5.4.3	Koefisien determinasi (Adjusted R ²).....	48
BAB IV HASIL ANALISIS DATA		50
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	50
4.2	Analisis Data	50
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	50
4.2.1.1	Statistik Deskriptif Variabel Dependen	51
4.2.1.2	Statistik Deskriptif Variabel Independen	52
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	56
4.2.2.1	Uji Normalitas Data.....	56
4.2.2.2	Uji Autokorelasi.....	57
4.2.2.3	Uji Multikorelasi.....	59

4.2.2.4	Uji Heteroskedastisitas	60
4.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	63
4.2.4	Pengujian Hipotesis	63
4.2.4.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	63
4.2.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	64
4.2.4.3	Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) ...	65
4.2.5	Hasil Pengujian Hipotesis.....	65
4.3	Intepertasi Hasil	68
4.3.1	Pengaruh Kecakapan Auditor terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.....	68
4.3.2	Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.....	69
4.3.3	Pengaruh Jumlah SKPD terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.....	71
4.3.4	Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.....	73

4.3.5 Pengaruh Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	74
4.3.6 Pengaruh Masa Jabatan Kepala Daerah terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	75
4.3.7 Pengaruh Pengawasan Legislatif terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.....	77
BAB V PENUTUP	78
5.1 Simpulan	78
5.2 Keterbatasan.....	80
5.3 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Sumber Data	43
Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan Autokorelasi Durbin Watson	45
Tabel 4.1 Rincian Populasi dan Sampel Penelitian	50
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Dependen.....	51
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Independen	52
Tabel 4.4 Sertifikasi Auditor.....	53
Tabel 4.5 Tabel Frekuensi Tipe Pemerintah Daerah.....	55
Tabel 4.6 Tabel Frekuensi Masa Jabatan kepala Daerah	55
Tabel 4.7 Uji Non-parametrik Kolmogorov-Smirnov	57
Tabel 4.8 Kriteria Pengambilan Keputusan Autokorelasi Durbin Watson...	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi.....	58
Tabel 4.10 Hasil Run Test	59
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel 4.12 Hasil Uji Glejser.....	62
Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	63
Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji F)	64
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	65
Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pemerintah daerah tahun 2005-2016	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1 <i>Scatterplot</i>	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Tabulasi Data Penelitian	85
Lampiran B Hasil Uji Statistik.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya yang melimpah baik sumber daya mineral, tambang, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, hingga potensi pariwisata. Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya dalam pengelolaan sumber daya tersebut adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang mengemban amanat dari masyarakat untuk dipergunakan semata-mata untuk kepentingan rakyat sehingga tidak terjadi monopoli yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan kekayaan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu semata.

Dalam tugasnya menjalankan pemerintahan, pemerintah perlu dipantau dan diawasi agar dapat menghindari penyimpangan yang mungkin dapat dilakukan oleh para penyelenggara negara. Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dapat dilakukan oleh pihak legislatif (DPR dan DPRD) yang menjadi perwakilan dari suara rakyat, lembaga pemerintah lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian,

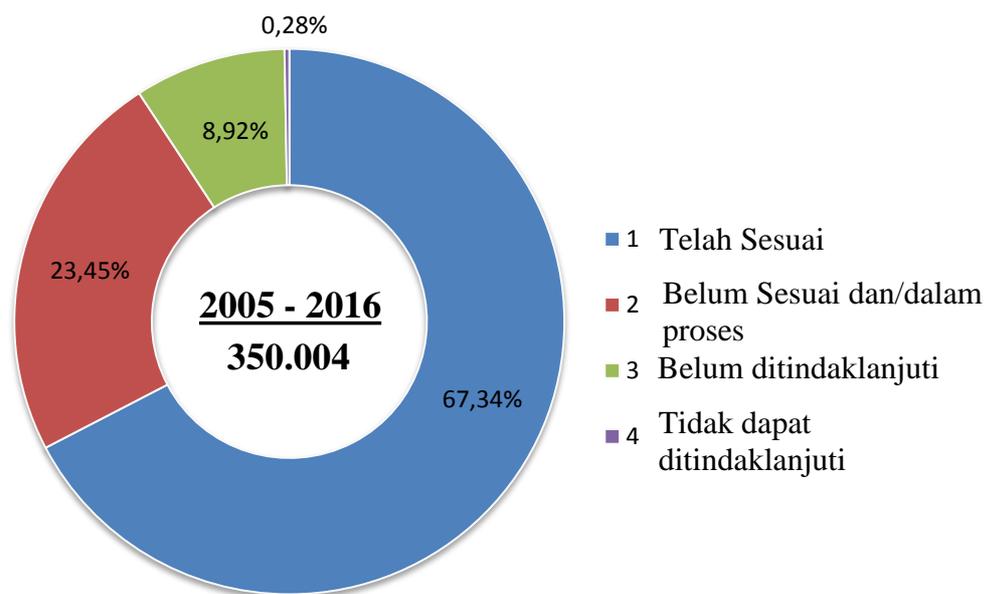
serta masyarakat sendiri yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung mengingat keterbukaan informasi yang semakin luas saat ini.

Salah satu cara untuk menghindari penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara maupun kinerja pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). BPK RI merupakan sebuah lembaga Negara yang memiliki tugas utama yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, sesuai dengan Amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya semata-mata pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tetapi BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Semua pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan menghasilkan temuan yang berisikan kelemahan-kelemahan serta ketidakpatuhan entitas pemerintahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Atas temuan tersebut, BPK juga menyampaikan rekomendasi yaitu saran terkait bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh entitas untuk memperbaiki kelemahan dan ketidakpatuhan yang telah terjadi tersebut.

BPK melakukan pemantauan tindak lanjut yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga negara. Dalam kurun waktu tahun 2005 hingga semester I tahun 2016, BPK telah menyampaikan 350.004 rekomendasi atas pemeriksaan terhadap pemerintah daerah senilai Rp54,29 triliun kepada entitas pemerintah daerah. Gambar 1.1 berikut menunjukkan status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi periode tahun 2005 hingga 2016:

Gambar 1.1
Status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pemerintah daerah tahun 2005-2016



Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 235.706 rekomendasi (67,34%), sebanyak 82.092 rekomendasi (23,45%) belum sesuai dengan rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 31.216 rekomendasi

(8,92%) belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 990 rekomendasi (0,28%) tidak dapat ditindaklanjuti.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK belum sepenuhnya dilakukan secara cepat dan memadai. Padahal sesuai dengan pasal 20 dan 26 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, para pejabat terkait hasil pemeriksaan BPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Serta setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah hal yang sangat penting dan mutlak harus dilakukan oleh entitas pemeriksaan karena dapat dijadikan sebuah wujud dari timbal balik atas hasil pemeriksaan. Manfaat dari pemeriksaan baru dapat dirasakan ketika temuan dan rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti (Dwiputrianti, 2011). Tanpa adanya timbal balik tersebut, hasil pemeriksaan yang dilakukan akan menjadi tidak berarti karena tidak dapat membawa sebuah perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dan tidak menutup kemungkinan kelemahan tersebut dapat terulang pada masa yang akan datang.

Selain entitas pemerintah, BPK juga memiliki andil yang penting dalam rangka mempermudah pelaksanaan tindak lanjut, yaitu dengan memberikan rekomendasi atas temuan audit yang berkualitas. Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menyebutkan bahwa rekomendasi yang bersifat membangun dapat mendorong perbaikan dalam pelaksanaan program entitas yang diperiksa. Suatu rekomendasi akan bersifat sangat konstruktif/membangun apabila: (1) diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan; (2) berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; (3) ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak; (4) dapat dilaksanakan; dan (5) apabila dilaksanakan, biayanya memadai. ASOSAI (dalam Setyaningrum, dkk 2013) menyatakan bahwa semakin besar persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterima dan diimplementasikan oleh *auditee* merupakan suatu indikator kualitas audit yang tinggi dan kualitas auditor menentukan kualitas audit yang dilakukannya. Kemampuan auditor untuk menghasilkan suatu rekomendasi audit dapat ditentukan dari kompetensi auditor tersebut.

Penelitian yang secara khusus berfokus pada tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih belum banyak dilakukan. Penelitian terkait auditing lebih banyak mengangkat terkait proses pemeriksaan hingga pelaporan hasil pemeriksaan. Beberapa penelitian yang tidak secara khusus membahas tentang tindak lanjut pemeriksaan dilakukan oleh Liu dan Lin (2012) yang meneliti pemeriksaan pada sektor publik dan pengendalian korupsi di Cina, salah satu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan (*rectification*) yang dilakukan pemerintah daerah berhubungan negatif dengan tingkat korupsi yang terjadi. Hartono (2013) melakukan penelitian mengenai penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan audit yang merupakan salah satu unsur penilaian kinerja manajemen pada kantor cabang Bank BTN.

Beberapa penelitian yang berfokus pada tindak lanjut di antaranya dilakukan oleh Setyaningrum, dkk (2013) yang meneliti tentang pengaruh kualitas auditor terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas auditor yang dibentuk dari tiga faktor yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan berhubungan positif dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Lebih lanjut Setyaningrum, dkk (2014) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindak lanjut rekomendasi audit dengan menambahkan variabel pengawasan legislatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas auditor dan pengawasan legislatif berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi audit.

Kristiawan (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, dengan menggunakan karakteristik auditor, karakteristik auditee dan juga karakteristik kepala daerah sebagai variabel penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik auditor yaitu kecakapan profesional auditor dan latar belakang pendidikan auditor berpengaruh positif dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tipe pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sedangkan jumlah entitas akuntansi dalam sebuah pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan

kegiatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Sementara itu, karakteristik kepala daerah tidak memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI.

Bagaskara (2014) juga melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan kinerja pemerintah daerah, pertanggungjawaban kepada masyarakat dan akses informasi publik berpengaruh signifikan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sedangkan pengawasan DPRD tidak berpengaruh signifikan.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan sehingga dirasa perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Pada penelitian ini, penelitian dibagi menjadi tiga fokus yaitu dari segi kompetensi auditor, karakteristik pemerintah daerah serta pengawasan legislatif. Alasan dipilihnya variabel-variabel tersebut adalah karena ketiga instansi (BPK, Pemerintah daerah dan DPRD) sama-sama memiliki peran yang saling berkaitan dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK.

Data yang diteliti adalah data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di lingkungan pemerintah daerah hingga semester I tahun 2016. Alasan dipilihnya periode ini karena periode tersebut merupakan periode terkini yang dapat

dijadikan referensi yang menggambarkan perkembangan terakhir pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh BPK.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan hal yang penting dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Tetapi berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester (IHPS) I tahun 2016, hasil pemantauan tindak lanjut untuk pemerintah daerah di Indonesia masih terdapat 32,37% rekomendasi yang belum selesai dan belum ditindaklanjuti. Hal ini menandakan masih terdapat hal-hal yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan tindak lanjut tersebut dan topik ini dapat dijadikan hal yang menarik untuk diteliti.

Setyaningrum, dkk (2014) menemukan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya kualitas auditor dan pengawasan legislatif. Penelitian Kristiawan (2014) menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi adalah karakteristik auditor yang terdiri dari kecakapan profesional auditor dan latar belakang pendidikan auditor, serta karakteristik auditee yang terdiri dari tipe

pemerintah daerah dan jumlah entitas akuntansi. Sedangkan pada penelitian Bagaskara (2014) menemukan bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah, pertanggungjawaban kepada masyarakat dan akses informasi publik.

Pihak yang berkaitan erat dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah auditor BPK sebagai pembuat rekomendasi, pemerintah daerah sebagai pihak yang melakukan tindak lanjut serta DPRD selaku perwakilan rakyat yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut. Sehingga ketiga pihak tersebut dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut.

Pada penelitian ini peneliti bermaksud melakukan pengujian kembali terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang berasal dari ketiga pihak yang berkaitan dengan penyelesaian tindak lanjut tersebut. Dengan menggunakan data terkini, akan dilakukan pengujian apakah hasil yang didapat masih konsisten dengan temuan-temuan penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor kompetensi auditor (yang diprosikan dengan kecakapan auditor) berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK?

2. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK?
3. Apakah jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK?
4. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK?
5. Apakah ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK?
6. Apakah masa jabatan kepala daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK?
7. Apakah pengawasan legislatif (DPRD) berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh kompetensi auditor terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
2. Menguji pengaruh faktor-faktor karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

3. Menguji pengaruh pengawasan legislatif (DPRD) terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat tersebut antara lain:

1. Memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait seperti BPK, Pemerintah daerah, maupun DPRD mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
2. Memberikan sumbangan bukti empiris pada literatur akuntansi, khususnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan hipotesis-hipotesis terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang variabel penelitian, populasi, sampel, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini berisi tentang objek penelitian, analisis yang digunakan, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.